

**PENGARUH UMUR DAERAH, TIPE PEMERINTAH DAERAH DAN JUMLAH LEGISLATIF
TERHADAP TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PENGAWAS KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
DI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Nama : Apriansyah

Nim : 222019061

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2024**

**PENGARUH UMUR DAERAH, TIPE PEMERINTAH DAERAH DAN JUMLAH LEGISLATIF
TERHADAP TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PENGAWAS KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
DI SUMATERA SELATAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen**



Nama : Apriansyah

Nim : 222019061

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Apriansyah

NIM : 222019061

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi: Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : Pengaruh Umur Daerah, Tipe Pemerintah Daerah, Dan Jumlah Legislatif Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2024



Apriansyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Umur Daerah, Tipe Pemerintah Daerah, Dan Jumlah Legislatif Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Selatan

Nama : Apriansyah
Nim : 222019061
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan disahkan
Pada tanggal, Maret 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN : 0206046303

Anggrelia Afrida, S.E., M.Si
NIDN : 218048403

Mengetahui
Dekan

U.b Ketua Program Studi Manajemen



Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN : 0216106902/944806

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya." **(QS. Al-Baqarah : 286)**

"Kalau tidak bisa bersaing dengan orang sholeh dalam memperbanyak amal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam memperbaiki diri."

(Ustadz Adi Hidayat)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan berjalan selalu lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan." **(X. Boy Candra)**

Alhamdulillah Ya Allah, Dengan izin & Rahmat-Mu Skripsi ini ku Persembahkan kepada:

- ❖ Untuk kedua orang tua ku tersayang Bapak (H. Mangkonak) dan Ibu (Hj. Andi Sri Wahyuni)
- ❖ Saudaraku Kakak (Hasan Basri, Hasnah, Siti Lija, Tola) dan Adik (Andi Sinar)
- ❖ Orang yang selalu mendukung (Apt. Andi Fitriyani, S.Frm)
- ❖ Sahabat dan teman teman seperjuanganku
- ❖ Almamater kebanggaanku

3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Anggrelia Afrida, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Drs. Sunardi, S.E., M.Si dan Ibu Anggrelia Afrida, S.E., M.Si selaku Pembimbing 1 dan 2
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Badan Pusat Statistik Kota Palembang.
8. Terima kasih kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuisisioner untuk bahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakataatuh.

Palembang, 19 Maret 2024
Penulis,

Apriansyah
NIM : 222019061

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiat	iii
Tanda Pengesahan Skripsi.....	iv
Moto Dan Persembahan	v
Prakata	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
Abstrak.....	xiii
Abstract.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN	
HIPOTESIS	15
A. Landasan Teori.....	15
B. Penelitian Sebelumnya	28
C. Kerangka Pemikiran.....	30
D. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Operasionalisasi Variabel	35

D. Populasi dan Sampel	35
E. Data yang Diperlukan	37
F. Metode Pengumpulan Data	37
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan Hasil Penelitian	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	69
A. Simpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Umur dan Tipe Pemerintah Daerah dan jumlah legislatif	10
Tabel I. 2 Tindak lanjut rekomendasi	11
Tabel II. 1 Penelitian Sewbelumnya	30
Tabel III. 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	35
Tabel III. 2 Nama Kabupaten Dan Kota	36
Tabel IV. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	54
Tabel IV. 2 Hasil Uji Validitas Normalitas	56
Tabel IV. 3 Hasil Uji Multikolinierlitas	57
Tabel IV. 4 Hasil Uji Autokorelasi	59
Tabel IV. 5 Hasil Regensi Linier Berganda.....	60
Tabel IV. 6 Uji Koefesien Determinasi.....	61
Tabel IV. 7 Uji F Anova.....	61
Tabel IV. 8 Hasil Uji Hipotesis Secara Persial (t).....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	31
Gambar IV.1 Scatterplot	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

Lampiran 2 Kuesioner

Lampiran 3 Tabulasi

Lampiran 4 Frekuensi Jawaban Responden

Lampiran 5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Lampiran 6 Hasil Uji F, Uji t, Uji R, dan Koefisien Determinasi

Lampiran 7 Tabel R

Lampiran 8 Tabel F

Lampiran 9 Tabel t

ABSTRAK

Apriansyah / 222019061 / 2024 / : Pengaruh Umum Daerah, Tipe Pemerintah Daerah dan Jumlah Legislatif Terhadap Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh umum daerah, tipe pemerintah daerah dan jumlah legislatif terhadap pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pengawas keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 kabupaten dan kota. Sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas) dan analisis regresi linier berganda (koefisien determinasi dan uji t). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel umum daerah, tipe pemerintah daerah dan jumlah legislatif berpengaruh signifikan terhadap pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pengawas keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan

Kata Kunci: Umum Daerah, Tipe Pemerintah Daerah, Jumlah Legislatif, Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

ABSTRACT

Apriansyah / 222019061 / 2024 / : General Influence of Regions, Type of Regional Government and Number of Legislators on Monitoring Follow-up Recommendations on Financial Supervisory Agency Audit Results in Regency and City Governments in South Sumatra

This research aims to determine and partially analyze the general influence of regions, type of regional government and number of legislatures on monitoring follow-up to recommendations from audit results from financial supervisory bodies in district and city governments in South Sumatra. The type of research used in this research is associative research. The population in this study was 17 districts and cities. The sample used is a saturated sample. The data used is secondary data. The data analysis techniques used are descriptive statistics and inferential statistics, namely classical assumption tests (normality, multicollinearity and heteroscedasticity tests) and multiple linear regression analysis (coefficient of determination and t test). The results of this research can be partially concluded (t test) showing that general regional variables, type of regional government and number of legislators have a significant effect on monitoring follow-up recommendations from audit results from financial supervisory bodies in district and city governments in South Sumatra

Keywords: Regional General, Type of Regional Government, Number of Legislators, Follow-up Monitoring of Recommendations from Audit Results

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Entitas pemerintah dan swasta berperan dalam meraih tujuan yang telah dideklarasikan melalui struktur organisasi yang dijalankan oleh sekelompok individu yang terlibat sebagai penyelenggara. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus program dan kebijakan publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewajiban mengelola sumber daya keuangan, mengalokasikan anggaran sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, dan memastikan penggunaan dana publik dilakukan dengan efisien. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Keuangan (BPK) memiliki peran krusial dalam melakukan audit dan memberikan saran kepada pemerintah daerah.

Badan Pengawas Keuangan (BPK) memiliki peran yang krusial dalam mengawasi dan memantau pengelolaan keuangan daerah, dengan melakukan inspeksi secara berkala dan menyelidiki kemungkinan pelanggaran keuangan, ketidaksiesuaian kebijakan, serta praktik-praktik yang tidak efektif. Temuan dari inspeksi ini kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah terkait untuk tindakan korektif. Selain itu, BPK juga memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah melakukan tindak lanjut terhadap saran-saran dari hasil

inspeksi BPK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai institusi independen memiliki peran utama dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu fungsi kunci BPK adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan inspeksi dan hasilnya. Pemantauan ini meliputi serangkaian kegiatan untuk menilai kualitas inspeksi, memastikan kepatuhan terhadap standar audit, dan memantau implementasi saran-saran dari hasil inspeksi.

Langkah lanjut atas rekomendasi hasil inspeksi BPK adalah tahapan krusial dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset negara di Indonesia. Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan inspeksi, mereka mengeluarkan saran-saran perbaikan dan tindakan lanjut yang harus diambil oleh instansi pemerintah terkait. Saran-saran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan dengan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang maksimal.

Kegagalan dalam menindaklanjuti rekomendasi dapat menghadirkan potensi risiko yang signifikan dalam manajemen dana publik, termasuk kemungkinan penyalahgunaan dana atau pelanggaran aturan. Oleh karena itu, pentingnya tindak lanjut yang sesuai dan tepat waktu tidak bisa diabaikan. BPK juga bertanggung jawab untuk memantau proses tindak lanjut guna memverifikasi bahwa instansi pemerintah telah melaksanakan perbaikan yang diperlukan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah, dengan fokus utama pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPK secara rutin

melakukan audit keuangan terhadap instansi pemerintah untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Temuan dari audit ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah, yang mencakup berbagai aspek seperti kebijakan pengelolaan aset, proses pengadaan barang dan jasa, serta manajemen keuangan secara menyeluruh.

Hubungan antara BPK dan pemerintah tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan, tetapi juga berperan dalam mendorong peningkatan tata kelola.

Sebagai lembaga pengawas yang independen, BPK memberikan evaluasi kritis terhadap kinerja pemerintah, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perubahan dalam sistem tata kelola, termasuk perubahan dalam kebijakan dan prosedur yang mendukung peningkatan kinerja.

Perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset juga menjadi fokus utama. BPK dapat menyarankan peningkatan transparansi dengan cara menyediakan informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat serta menguraikan informasi terkait aset dalam laporan keuangan. Selain itu, pelaporan dan dokumentasi yang terkait dengan aset juga menjadi perhatian, dimana BPK mendorong pemerintah untuk memelihara catatan yang akurat dan lengkap mengenai perolehan, penggunaan, dan penghapusan aset. Tindak lanjut terhadap rekomendasi ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan aset negara serta untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Secara keseluruhan, langkah-langkah tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian integral dari sistem pengawasan keuangan pemerintah di Indonesia dan merupakan mekanisme yang penting untuk menjamin akuntabilitas, keterbukaan, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Ini membantu memastikan bahwa permasalahan yang teridentifikasi oleh BPK ditangani dengan serius dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, mekanisme pengawasan dan rekomendasi BPK membantu memastikan bahwa sumber daya publik dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan menerapkan rekomendasi BPK, pemerintah daerah dapat mengenali dan mengatasi potensi penyimpangan keuangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik untuk program-program dan kebijakan yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang merupakan sebuah lembaga pemerintah yang berperan sebagai bagian dari struktur pelaksanaan tugas dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di wilayah Kota Palembang. Fokus utama kegiatan kantor ini lebih terkait dengan interaksi langsung dengan masyarakat. Pegawai yang bertugas di Kantor Kesbangpol Kota Palembang diharapkan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dan oleh karena itu, mereka harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi kinerja pegawai, seperti gaya kepemimpinan, tingkat motivasi, dan kondisi lingkungan kerja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pipit Siti Jenar Puspita Sari dan rekannya pada tahun 2017, ditemukan bahwa beberapa faktor mempengaruhi langkah tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Faktor-faktor tersebut meliputi usia wilayah, jenis pemerintahan yang berlaku, dan jumlah anggota legislatif. Hal ini mengisyaratkan bahwa variabel-variabel ini dapat memiliki dampak pada bagaimana rekomendasi BPK direspons dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Umur daerah merujuk pada waktu atau lamanya suatu wilayah, kota, atau daerah telah ada atau berdiri sebagai entitas geografis dan administratif. Konsep umur daerah dapat diukur dalam berbagai konteks, termasuk sejarah, pendirian pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan geografis. Umur daerah dapat sangat beragam, tergantung pada sejarah dan perkembangan daerah tersebut. Beberapa daerah mungkin telah ada selama ratusan tahun atau lebih, sementara yang lain mungkin baru saja didirikan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, kemajuan ekonomi, perubahan politik, dan peristiwa bersejarah tertentu dapat memengaruhi umur dan perkembangan suatu daerah. Dengan demikian, umur daerah mencerminkan riwayat dan evolusi suatu wilayah atau entitas administratif dalam konteks waktu. Berumurnya suatu wilayah sering menjadi aspek kunci dalam menganalisis sejarah dan evolusi sosial, ekonomi, serta politik suatu daerah. Penelitian terhadap usia wilayah dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana daerah tersebut mengalami perubahan dari masa ke masa dan bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah berdampak pada pertumbuhannya.

Di samping itu, jenis pemerintahan juga memiliki dampak pada pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Jenis pemerintahan daerah memengaruhi implementasi saran-saran yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena setiap jenis pemerintahan memiliki struktur, wewenang, dan prosedur pengambilan keputusan yang berbeda. Beberapa bentuk pemerintahan daerah yang umum di Indonesia meliputi Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Struktur pemerintahan lokal ini memainkan peran penting dalam menjalankan saran-saran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) karena mereka memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda dalam administrasi keuangan dan aset publik di wilayahnya. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki tanggung jawab utama dalam mengurus keuangan publik di tingkat lokal, termasuk proses anggaran, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pemerintah.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit BPK umumnya dilakukan oleh otoritas pemerintahan daerah yang berwenang. Pemerintah setempat harus menanggapi rekomendasi BPK dengan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi temuan yang ada. Tindakan ini mungkin mencakup peningkatan sistem, koreksi kebijakan, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Lebih lanjut lagi, jenis pemerintahan lokal juga dapat memengaruhi tingkat kemandirian dan kemampuan administratif yang ada. Provinsi, kabupaten, dan kota dengan sumber daya dan kemampuan yang beragam mungkin memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerapkan rekomendasi BPK. Dengan

demikian, pemahaman tentang struktur pemerintahan daerah dan karakteristik administratifnya menjadi kunci dalam memahami bagaimana tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK akan dijalankan di tingkat lokal.

Jumlah anggota legislatif dalam konteks pelaksanaan rekomendasi BPK merupakan elemen krusial yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan bahwa rekomendasi tersebut tidak hanya diterima, tetapi juga diimplementasikan dengan efektif oleh pemerintah daerah. Peranan badan legislatif dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan rekomendasi BPK juga perlu dipertimbangkan secara seksama.

Badan legislatif memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana dana publik dialokasikan dan kebijakan mana yang akan mendukung reformasi keuangan daerah. Dalam hal pengalokasian anggaran, badan legislatif dapat menetapkan prioritas penggunaan dana publik, termasuk alokasi dana untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dalam rekomendasi BPK. Kemampuan badan legislatif untuk mengalokasikan anggaran dengan bijaksana dan sesuai dengan prioritas reformasi keuangan daerah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi reformasi tersebut.

Badan legislatif memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana dana publik dialokasikan dan kebijakan mana yang mendukung reformasi keuangan daerah. Dalam konteks alokasi anggaran, badan legislatif dapat menetapkan prioritas penggunaan dana publik, termasuk alokasi dana untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dalam rekomendasi BPK. Kemampuan badan legislatif untuk mengalokasikan anggaran secara bijaksana dan sesuai dengan

prioritas reformasi keuangan daerah menjadi faktor kunci dalam kesuksesan implementasi reformasi tersebut.

Badan legislatif juga memiliki peran penting dalam mengubah atau menyesuaikan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung perubahan yang direkomendasikan oleh BPK. Hal ini dapat meliputi pembuatan undang-undang atau peraturan daerah yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan tersebut. Oleh karena itu, kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan badan legislatif menjadi kunci penting dalam mengatasi hambatan dan memastikan bahwa rekomendasi BPK dijalankan dengan efektif untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus masalah-masalah lokal, namun, struktur dan karakteristik pemerintahan daerah berbeda-beda di berbagai negara. Misalnya: di Indonesia, struktur pemerintah daerah terbagi menjadi kota, kabupaten, dan provinsi, sementara di negara lain seperti Amerika Serikat, terdapat pembagian seperti kota, county, dan negara bagian. Memahami variasi ini penting untuk menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengurus berbagai aspek lokal, termasuk infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan masyarakat.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspitasari dan rekan (2017) menemukan bahwa beberapa faktor seperti pemerintah daerah, jumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), masa jabatan kepala daerah, umur pemerintahan daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, dan pengawasan legislatif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindak lanjut terhadap

rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan pada Pemerintah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ken Yulita Maulydiba Kusumarini dan rekan (2022) menemukan bahwa umur pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Bayu Anggoro Kristiawan (2014) menyimpulkan bahwa tipe pemerintahan juga memiliki pengaruh yang berarti atau menakutkan terhadap tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh umur daerah, tipe pemerintah daerah, jumlah anggota legislatif. Berikut ini data yang berhubungan dengan variabel penelitian data umur, tipe pemerintah daerah, jumlah legislatif dan tindak lanjut rekomendasi sebagai berikut:

Tabel I.1
Data Umur dan Tipe Pemerintah Daerah, dan Jumlah Legislatif

No	Kabupaten/Kota	Tahun Berdirinya	Umur Daerah		Tipe Pemerintahan		Jumlah Legislatif	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Ogan Komering Ulu	1959	62	63	0	0	35	35
2	Ogan Komering Ilir	1959	62	63	0	0	45	45
3	Muara Enim	1959	62	63	0	0	45	45
4	Lahat	1959	62	63	0	0	40	40
5	Musi Rawas	1959	62	63	0	0	40	40
6	Musi Banyuasin	1959	62	63	0	0	45	45
7	Banyuasin	2001	18	19	0	0	45	45
8	Ogan Ilir	2003	18	19	0	0	40	40
9	Empat Lawang	2007	14	15	0	0	45	45
10	OKU Selatan	2003	14	15	0	0	40	40
11	OKU Timur	2003	14	15	0	0	35	35
12	Penukal Abab Lematang Ilir	2013	14	15	0	0	25	25
13	Muratara	2013	8	9	0	0	25	25
14	Palembang	682	1339	1340	1	1	50	50
15	Prabumulih	2001	20	21	1	1	25	25
16	Pagaralam	2001	20	21	1	1	25	25
17	Lubuk Linggau	2001	20	21	1	1	28	30

Sumber : Kesbangpol, (2022)

Keterangan: 0 : Kabupaten
1 : Kota

Tabel I.2
Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Kabupaten/Kota	Tindak Lanjut Rekomendasi	
		2021	2022
1	Ogan Komering Ulu	58,30%	23,30%
2	Ogan Komering Ilir	54.8 %	13,90%
3	Muara Enim	78.0 %	36,00%
4	Lahat	67.7 %	51,20%
5	Musi Rawas	52.9 %	35,40%
6	Musi Banyuasin	67.4 %	44,00%
7	Banyuasin	63.2 %	31,90%
8	Ogan Ilir	45.5 %	18,50%
9	Empat Lawang	88.9 %	43,50%
10	Ogan Komering Ulu Selatan	79.2 %	61,10%
11	Ogan Komering Ulu Timur	69.0 %	37,50%
12	Penukal Abab Lematang Ilir	60.0 %	48,50%
13	Muratara	69.7 %	44,40%
14	Palembang	70.5 %	44,40%
15	Prabumulih	86.7 %	55,60%
16	Pagaralam	50.0 %	53,30%
17	Lubuk Linggau	50.0 %	0,00%

Dilihat dari Tabel I.1 dan I.2 di atas, Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2022 menunjukkan persentase tindak lanjut yang paling tinggi dari semua kabupaten yang disebutkan, meskipun memiliki umur pemerintahan yang masih relatif muda. Sebaliknya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah berusia 63 tahun, menunjukkan persentase tindak lanjut yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Muratara, yang baru berusia 9 tahun, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam persentase tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor selain umur daerah juga dapat memengaruhi tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan, dan bahwa umur pemerintahan bukanlah

satu-satunya penentu kesuksesan implementasi rekomendasi.

Pemerintah Kota Prabumulih, meskipun memiliki jumlah anggota legislatif yang lebih sedikit dibandingkan dengan Pemerintah Kota Palembang, mampu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tingkat yang lebih tinggi. Tingkat tindak lanjut yang tinggi ini menempatkan Pemerintah Kota Prabumulih sebagai yang terbesar di antara pemerintah kota lainnya di Sumatera Selatan, dan sebagai yang kedua terbesar di antara seluruh pemerintahan kabupaten dan kota setelah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK tidak selalu tergantung pada jumlah anggota legislatif atau ukuran pemerintahan, tetapi juga bergantung pada faktor-faktor lain seperti manajemen, kebijakan, dan kapasitas administratif.

Fenomena yang berhubungan dengan data penelitian adalah tidak semua daerah yang memiliki umur yang besar diikuti respon tindak lanjut rekomendasi BPK dan tidak semua umur daerah yang lebih tua memiliki persentase hasil rekomendasi yang besar maupun sebaliknya. Tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilaksanakan oleh Pemkab dan Pemkot tersebut dipantau oleh BPK.

Memperhatikan Tabel I.1 dan analisis atas konteks permasalahan, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki topik yang diberi judul **“Pengaruh Umur Daerah, Tipe Pemerintah Daerah, dan Jumlah Legislatif Terhadap Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan gambaran latar belakang isu yang dihadapi, pertanyaan penelitian dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh umur daerah, tipe pemerintahan daerah dan jumlah anggota legislatif terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara simultan ?
2. Bagaimanakah pengaruh umur daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI?
3. Bagaimanakah pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI?
4. Bagaimanakah pengaruh jumlah anggota legislatif terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI?

C. Tujuan Penelitian

Berorientasi terhadap rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, fokus utama penelitian ini adalah memahami atau mengidentifikasi:

1. Untuk mengetahui pengaruh umur daerah, tipe pemerintahan daerah dan jumlah anggota legislatif terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara simultan
2. Untuk mengetahui pengaruh umur daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara parsial
3. Untuk mengetahui pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara parsial

4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota legislatif terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara parsial

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kebermanfaatan bagi para pihak yang terlibat.

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah memperluas pemahaman dan memperkaya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan rekomendasi Badan Pengawas Keuangan.

2. Bagi Pemerintahan Kabupaten dan Kota

Dengan menerapkan hasil penelitian ini, pemerintah yang menjadi fokus penelitian diharapkan dapat memperkuat kemampuannya dalam menanggapi hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan, memperbaiki tata kelola keuangan, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tersebut.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber referensi bagi mahasiswa, menjadi bahan literatur yang berguna, dan menjadi titik awal bagi peneliti yang ingin menjalankan penelitian serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Kurniawan. (2014). *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis: Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Bayu Anggoro Kristiawan. (2014). *Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Dani Habibi. (2020). *Perluasan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Mengawasi Keuangan Negara di Lingkup Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Integritas* Volume 1 Nomor 1, 2020.
- Diah Isnaini Asiati, dkk. (2019). *Penelitian Untuk Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irman, Mimelientesa dan Suryati. 2017. *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan Pada Perundang-Undangan, Opini Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2014*. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis* 2014:197–209.
- Ken Yulita Maulydiba Kusumarini. (2022). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Periode 2009-2011)*. *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 3, Nomor 4.
- Lestari, Mery Mei, and Tina Lestari. "Analisis Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6.4 (2022): 3553-3565.
- Marbun B.N. (1993) *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*. Jakarta: Erlangga.
- Mery Mei Lestari. (2022). *Analisis Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan*. *Jurnal Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e – ISSN : 2548-9224 | p-ISSN : 2548-7507* Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022.
- Miriam Budiardjo (1995) *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nur dan Bambang Supomo. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera

Pratiwi dan Ayani. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani* Volume 8, Nomor 2.

Priyatno, Duwi. (2016). Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS.

Puspitasari, P.S.J. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Bali. *Skripsi Universitas Diponegoro*.

Romie. (2017). Buku Sakti Kuasai SPSS Pengelolaan data dan Analisis data. Yogyakarta: Start Up.

Safitri, N.L.K.S.A. dan Darsono. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Temuan Kepatuhan terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 5.

Sanusi (2011) *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sari et al. (2015) dan Agusti. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Bali. *Skripsi Universitas Diponegoro*.

Setyaningrum, D., & Syafitri F. (2015). The Effect of Auditor Quality on the Follow-Up of Audit Recommendation. *International Research Journal of Business Studies*, Vol. 6, No. 2 h. 89-104.

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Gava Media.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah